

## Perppu Cipta Kerja Dikritik, Menkumham: Kritik Itu Normal

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menilai kritikan terhadap terbitnya suatu kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang biasa.

Menurutnya, pemerintah sudah mengakomodasi masukan masyarakat melalui perppu tersebut.

"Biasa lah. Kritik itu normal. Tapi ini pascakeputusan Mahkamah Konstitusi kita sudah melakukan sosialisasi, jaring aspirasi ke banyak pihak stakeholder yang ada," ujar Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (4/1).

"Jadi sudah kita, ada masukan, ada perubahan terutama di ketenagakerjaan ya. Ini sudah kita tampung dengan baik," katanya.

Ia mengklaim bahwa aturan Cipta Kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan kemudahan bagi berbagai sektor, mulai dari kemudahan usaha hingga mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pemerintah sejauh ini juga telah memenuhi partisipasi minimal serta petunjuk di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas UU tersebut, di dalam perppu. Meski begitu, ia mengatakan tentu pemerintah tidak bisa 100

persen mememuaskan permintaan semua masyarakat. Akan tetapi, ia mengatakan, pemerintah sudah berupaya untuk mengakomodir setiap masukan terkait UU Cipta Kerja.

"Karena pada waktu keputusan MK concern dari berbagai pihak, pertanyaan ke presiden dan lain-lain, 'gimana ini cipta kerja apakah hanya tidak berlanjut?' ujar Yasonna. 'Kami katakan 'masih tetap berlanjut tetapi kami akan memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi,'" imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Terbitnya Perppu ini menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu yang baru saja terbit diharapkan bisa menjadi implementasi dari putusan MK.

"Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini. ● han

## Pengecekan Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digelar Tertutup

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mendatangi rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Jakarta Selatan. Pengecekan rumah Sambo dilakukan tertutup.

Pantau di Jalan Saguling III, pukul 14.20 WIB, Rabu (4/1), tampak ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso tiba di pekarangan rumah pribadi Sambo. Sejumlah hakim tiba, jaksa dan para pengacara terdakwa kasus pembunuhan Yosua sudah lebih dulu tiba.

Rombongan hakim, jaksa dan pengacara kemudian masuk ke rumah pribadi Sambo. Hakim Wahyu mengatakan pengecekan hanya diikuti jaksa dan para pengacara.

Pengecekan langsung ke TKP ini dilakukan majelis hakim atas permintaan pengacara Sambo. Tempat kejadian perkara yang didatangi adalah rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan dan rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling III, Jakarta Selatan.

Ferdy Sambo dan para terdakwa lain tidak dilibatkan. Pengecekan dilakukan atas permintaan pengacara Sambo.

"Bagaimana kalau kita dijadwalkan besok siang setelah

sidangnya Ricky? Cuma yang hadir adalah para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak usah hadir," kata hakim Wahyu Iman Santoso saat sidang kasus pembunuhan terdapat Brigadir Yosua Hutabarat kemarin.

Hakim juga memerintahkan jaksa menghubungi para penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang, Ricky Rizal, dan Khat Ma'rif untuk hadir dalam peninjauan tersebut. Hakim mengatakan Eliezer dkk tidak perlu hadir dalam peninjauan tersebut.

"Jadi hanya para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, mohon nanti dihubungi setelah sidangnya Ricky mungkin sekitar jam 14.00 WIB," ucap hakim Wahyu.

Pengacara Sambo, Arman Hanis, sempat menyarankan jika TKP pembunuhan saja yang dikunjungi. Namun, hakim tetap mengatakan akan mengunjungi rumah pribadi Sambo juga di Jalan Saguling. Hakim juga menegaskan hanya ada pengecekan, bukan pembuktian saat berada di TKP.

"Baik, khusus di Duren Tiga, Yang Mulia," kata Arman.

"Duren Tiga dan Saguling kita melihat," timpal hakim Wahyu. "Baik," jawab Arman. ● han



### SIDANG TUNTUTAN ANDI DESFIANDI

Terdakwa kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung Andi Desfiandi menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, Rabu, (4/1). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Andi Desfiandi dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta.

## Anak Tega Menghabisi Nyawa Ibu dan Ayah Kandungnya di Jambi

TANJAB BARAT (IM) - Seorang anak tega membunuh ibu dan ayah kandungnya di RT 3, Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Penggabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi.

Tersangka berinisial DO (25), menghabisi nyawa kedua orang tua kandungnya, Rohma dan Khairul Anwar.

Ketua RT 3 Teluk Nilau, Bahtiar mengaku tidak mengetahui pasti jam berapa kejadian mengegerkan kampongnya.

"Iya, sekarang korban tengah dalam proses untuk

dimakamkan," ujarnya, Rabu (4/1).

Terkait motif pembunuhan, dirinya masih belum mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan itu.

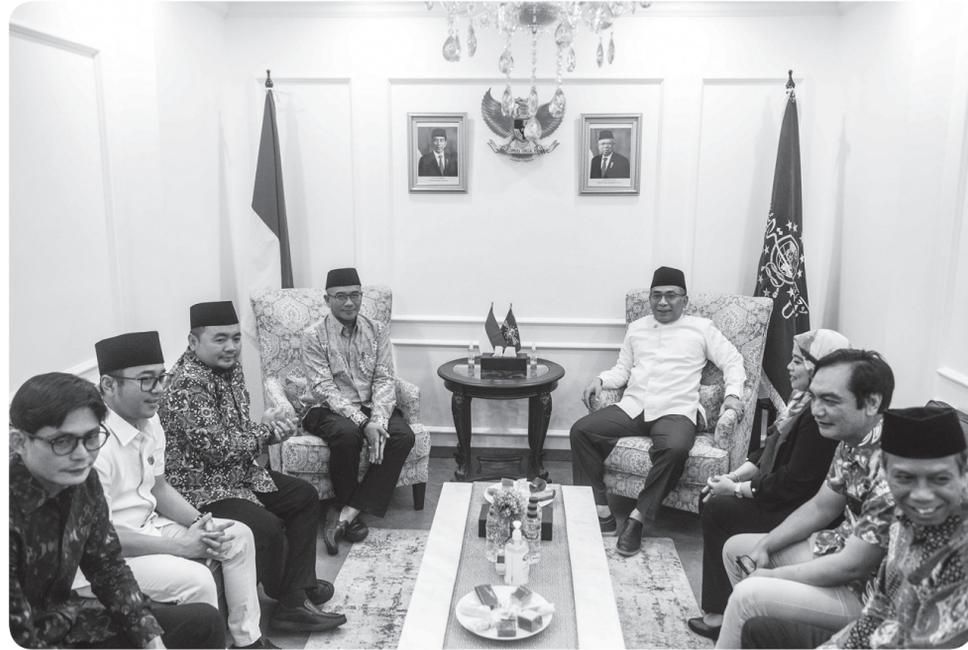
"Belum tau apa sebabnya. Kami baru tau pagi ini," kata Bahtiar.

Hingga saat ini, pihak kepolisian dari Polsek Penggabuan Polres Tanjungbarat masih berada di TKP.

Petugas masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. ● lus

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## Geger! Aliran Sesat "Bab Kesucian" di Gowa, Bakor Pakem Diminta Segera Ambil Tindakan

MUI menegaskan, "Bab Kesucian" merupakan aliran tersebut karena bertentangan dengan syariat Islam. Aliran sesat ini mengajarkan untuk tidak sholat lima waktu.

JAKARTA (IM) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap keberadaan aliran sesat "Bab Kesucian" yang ditemukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Sulaiman Tanjung mendesak Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) segera mengambil tindakan agar hal ini tidak meresahkan masyarakat.

"Meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini Bakor Pakem mensekresi hal-hal yang seperti ini supaya tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," kata Sulaiman saat dihubungi wartawan, Rabu (4/1).

Selain itu, Sulaiman juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas aliran itu. Karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

"Kalau memang terbukti nanti menyebabkan aliran sesat yang dilarang oleh republik ini. Maka kita meminta kepada pihak kepolisian supaya tegas

untuk mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan aliran sesat ini," tuturnya.

Sulaiman mengajak masyarakat untuk waspada terhadap aliran-aliran yang menyimpang. Sebab dia meyakini aliran tersebut bukan hanya ada di Gowa saja tetapi juga ada di daerah lainnya.

"PBNU meminta kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di sulsel agar waspada terhadap aliran seperti ini. Secara umum tentu masyarakat seluruh Indonesia karena kita meyakini aliran seperti ini tidak hanya terjadi di Gowa," ujarnya.

"Kita duga pasti ada dan ini kita memprediksi sudah menyebar.

Sulaiman mengingatkan bahwa masyarakat harus selalu waspada dan kembali ke ajaran Islam, Al Qur'an dan hadis agar terhindar dari pengaruh

aliran sesat.

### Melarang Sholat

Terungkapnya keneradaan aliran sesat "Bab Kesucian" di Gowa berawal dari salah satu warga yang bertanya kepada MUI Sulsel melalui pesan singkat WhatsApp soal aliran sesat.

Menanggapi hal tersebut, MUI Sulsel mengungkapkan ada 10 kriteria ajaran sesat. Berdasarkan 10 kriteria itu, maka ajaran "Bab Kesucian" yang berpusat di Gowa tersebut dinyatakan sesat.

Pertama, kelompok ini mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT yakni daging ikan dan susu.

"Jadi melarang orang minum susu meyalahi sunnah Nabi, serta merusak kesehatan manusia," kata MUI Sulsel dikutip dalam laman resminya, Senin (2/1).

Kedua, MUI menegaskan, aliran tersebut sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam karena mengajarkan untuk tidak melaksanakan sholat lima waktu. Padahal, dalam Rukun Islam yakni mengerjakan salat setelah bersyahadat sehingga

### PERTEMUAN KPU DENGAN PBNU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (keempat kiri) bersama Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Yahya Cholil Staquf (keempat kanan) didampingi masing-masing jajaran melakukan pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1). Pertemuan antara KPU dengan PBNU tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

## Eks Anggota DPR Miryam Haryani Diperiksa terkait Korupsi Kampus IPDN oleh KPK

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MEMERIKSA mantan Anggota DPR RI, Miryam S Haryani, Rabu (4/1). Ia diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Selain Miryam, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni, Kabinet Keuangan Daerah-Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri, Arya Mega Natalady dan Pejabat Vice Presidet Litigasi Devisi Legal PT Hutama Karya, Is Hendrisa Hendrayogi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (4/1).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPK, Miryam S Haryani telah datang

memenuhi panggilan pemeriksaan pada pagi ini. Belum diketahui apa yang bakal dialami penyidik dari keterangan Miryam Haryani. Namun, keterangannya dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan tersangka Dudi Jocom (DJ).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretaris Jenderal Kemendagri Dudy Jocom (DJ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Dudi Jocom ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan mantan Direksi PT Waskita Karya, Adi Wibowo yang telah divonis bersalah atas perkara tersebut. Saat ini, KPK masih melakukan penyelidikan untuk tersangka Dudi Jocom.

Selain di Gowa, Dudi Jocom juga ditetapkan sebagai

tersangka bersama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko. Dudi dan Doni ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

Kasus ini berawal ketika Dudi menghubungkan beberapa kontraktor untuk menginformasikan bahwa akan ada lelang proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi, pada tahun 2011. Sebelum lelang dilakukan, diduga telah disepakati adanya pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.

Waskita Karya bagian untuk menggarap proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan Adhi Karya, menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp11,18 Miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara. ● han

## Kopasgat Kerahkan 230 Personel Pengamanan Bandara Rawan di Papua

JAKARTA (IM) - Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan, sebanyak 230 personel Kopasgat yang akan melaksanakan tugas agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, selalu waspada, pahami tugas pokok dan aplikasikan materi praturgas yang diterima," kata Saleh melalui keterangan resminya, Selasa (3/1).

"Jumlah personel ada 230, dari satuan Kopasgat (Batalyon Komando) 468 Biak," ujar Kolonel Kav Herman Taryaman saat dikonfirmasi, Rabu (4/1) pagi.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, memimpin upacara penerimaan, dan pelepasan Satuan Tugas (Satgas) Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Jayapura, Selasa (3/1). Pangdam menjelaskan bahwa kondisi di wilayah Papua masih kerap terjadi gangguan keamanan, dan ketertiban yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan sarana prasarana infrastruktur lainnya.

Anggota Kopasgat saat menjalankan tugas yang baru harus memperhatikan aturan, dan menghindari terjadinya

menyalahi hal yang disepakati (ma'lum minaddin bidhorurah) adalah kekufuran dan sudah jelas telah keluar dari Islam.

"Atas poin-poin yang disebutkan di atas, maka aliran tersebut dianggap sesat," ujarnya.

Usai mendapatkan laporan tersebut, MUI Sulsel lantas melakukan pengecekan dan ternyata lokasi tersebut benar adanya. Di mana, cukup dekat dengan Kampus UIN Alauddin Makassar, bahkan kondisi jalan ke "Aliran Bab Kesucian" tersebut tampak cukup baik.

"Camat yang baru saja dilantik di daerah tersebut telah mengetahui hal tersebut dan nantinya kami akan meminta kepada pihak pemerintah dan seluruh pihak terkait melakukan pembinaan," katanya.

Terakhir, MUI Sulsel mengimbau agar masyarakat dapat menjauhkan diri dari aliran sesat tersebut.

"Demikian pula kepada masyarakat diimbau agar menjauhkan diri dari aliran yang bisa menyesatkan akidah terutama aliran seperti ini," ujarnya. ● han



### RAPAT KERJA PERDANA PEMPROV PAPUA BARAT DAYA

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (ketiga kiri) bersama Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Fatonni (ketiga kanan) memukul tifa saat membuka rapat kerja kepala daerah se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (4/1). Pemprov Papua Barat Daya berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah tersebut dengan melaksanakan rapat kerja perdana guna mensinergikan berbagai program unggulan yaitu persiapan pembangunan, keuangan daerah dan manajemen ASN.

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Qxpress Logistics Indonesia, tertanggal 27 Desember 2022 Nomor 33, dibuat di hadapan Merry Koesnadi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cianjur, telah diadakan **Pembubaran Perseroan Terbatas PT. Qxpress Logistics Indonesia**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Perseroan") beralamat di Green Sedayu Biz Park Daan Mogot, Blok Daan Mogot 5 nomor 025, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Keberatan-keberatan dan/atau sanggahan-sanggahan mengenai hal tersebut dapat diajukan ke alamat Perseroan dan tembusannya ditujukan kepada:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

PT. Qxpress Logistics Indonesia  
ttd  
Direksi